

JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021

Volume 4, No 2, Juli-Desember 2019

Evaluasi Kebijakan Program *Full Day School* Pada Sekolah Umum
Risnita dan Nova Asvio

Peran Kepala Sekolah Dalam Mensukseskan Program Literasi
Dewi Kartini dan Yuhana

SMK Berbasis Teknologi di Era Otonomi Daerah (Permasalahan dan Tantangan)
Voenly

Pemanfaatan TIK dalam Menumbuhkan Karakter Religius
Peserta Didik Sekolah Dasar di Gelumbang
Dwi Ammelia Galuh Primasari, Sri Maryani, Suparmanto, dan Diana Juwita

Supervisi Klinis oleh Kepala Sekolah terhadap Kualitas Pembelajaran
Kartini dan Susanti

Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Gaya Kepemimpinan
terhadap Keinovatifan Pejabat Administrator di Provinsi Jambi
Enadarlita

Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Guru
terhadap Prestasi Siswa SD Negeri Sekecamatan Pulau Rimau
Tobing Riyanto dan Masniar

Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru
Susilo dan Slamet Sutoyo

Keterampilan Guru dalam Mengelola Kelas untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Khoirul Khobir, Muhamad Yusuf, dan Amin Alhusaini

Pengelolaan Supervisi Akademik di Sekolah Dasar Negeri Pulau Rimau
Meili Kurniati dan Haeriyah

Membangun Karakter Peserta Didik Melalui *Green School* di SMK Negeri 2 Muara Enim
Muhammad Kristiawan, Nova Maryanti, dan Happy Fitria

Pola Pengasuhan Taruna Berbasis Keteladanan Pada Taruna Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Budi Riyanto dan Rivolindo

Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Padang
Hendri Budi Utama, Wachidi, dan Manap Somantri

JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

Terbit dua kali dalam setahun pada Januari dan Juli. Berisi tulisan Ilmiah Ilmu Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan yang merupakan ringkasan hasil penelitian.

Pelindung:
Meilia Rosani

Penasihat:
Bukman Lian

Penanggung Jawab:
Houtman

Pimpinan Redaksi:
Happy Fitria

Ketua Penyunting:
Edi Harapan

Penyunting Ahli:
Enco Mulyasa (Universitas Islam Nusantara)
Anakagung Gede Agung (Universitas Pendidikan Ganesha)
Salahuddin Khan (Gomal University, Pakistan)
Inaad Mutlib Sayeer (University of Human Development, Sulaimaniya, Iraq)
Imron Arifin (Universitas Negeri Malang)
Muhammad Kristiawan (Universitas Bengkulu)
Muhamad Fahrur Saifudin (Universitas Ahmad Dahlan)
Yuyun Elisabeth Patras (Universitas Pakuan, Bogor)
Suhono (Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung)

Penyunting Pelaksana:
Syarwani Ahmad
Tobari
Yasir Arafat

Tata Usaha:
M. Subhan Halid
Nur Hidayat

Penerbit
Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782
e-mail: jurnalmpupgripalembang@gmail.com

Daftar Isi

Evaluasi Kebijakan Program <i>Full Day School</i> Pada Sekolah Umum Risnita dan Nova Asvio	121 - 136
Peran Kepala Sekolah Dalam Mensukseskan Program Literasi Dewi Kartini dan Yuhana	137 - 144
SMK Berbasis Teknologi di Era Otonomi Daerah (Permasalahan dan Tantangan) Voently	145 - 151
Pemanfaatan TIK dalam Menumbuhkan Karakter Religius Peserta Didik Sekolah Dasar di Gelumbang Dwi Ammelia Galuh Primasari, Sri Maryani, Suparmanto, dan Diana Juwita	152 - 159
Supervisi Klinis oleh Kepala Sekolah terhadap Kualitas Pembelajaran Kartini dan Susanti	160 - 168
Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Gaya Kepemimpinan terhadap Keinovatifan Pejabat Administrator di Provinsi Jambi Enadarlita	169 - 179
Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Guru terhadap Prestasi Siswa SD Negeri Sekecamatan Pulau Rimau Tobing Riyanto dan Masniar	180 - 187
Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Susilo dan Slamet Sutoyo	188 - 193
Keterampilan Guru dalam Mengelola Kelas untuk Anak Berkebutuhan Khusus Khoirul Khobir, Muhamad Yusuf, dan Amin Alhusaini	194 - 201
Pengelolaan Supervisi Akademik di Sekolah Dasar Negeri Pulau Rimau Meili Kurniati dan Haeriyah	202 - 209
Membangun Karakter Peserta Didik Melalui <i>Green School</i> di SMK Negeri 2 Muara Enim Muhammad Kristiawan, Nova Maryanti, dan Happy Fitria	210 - 217
Pola Pengasuhan Taruna Berbasis Keteladanan Pada Taruna Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Budi Riyanto dan Rivilindo	218 - 224
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Padang Hendri Budi Utama, Wachidi dan Manap Somantri	225 - 228

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* PADA SEKOLAH UMUM

Risnita¹, dan Nova Asvio²

^{1,2}UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: risnita@uinjambi.ac.id

Abstrak: Efektif tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui setelah evaluasi terhadap kebijakan dilakukan. Kebijakan *Full day school* yang dicanangkan oleh Mendikbud yang berpayung hukum pada Permendikbud nomor 23 Tahun 2017 dianggap belum mampu diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, dikarenakan masih banyak hal-hal yang perlu dikaji ulang tentang pelaksanaannya, dimana masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam sistem pendidikan *full day school*. Untuk itu Permendikbud ini dibatalkan dengan dikeluarkannya Perpres nomor 87 Tahun 2017 pada pasal 9, dimana sistem pendidikan *full day school* hanya bersifat opsional, dan tidak wajib diterapkan di seluruh sekolah Indonesia. Merujuk ke negara-negara maju seperti AS, Jepang dan Finlandia dalam penerapan *full day school* juga tidak mewajibkan seluruh sekolahnya untuk menerapkan sistem ini. Bahkan, Finlandia sebagai negara ranking I di dunia dalam bidang pendidikan versi NF MED 2017, menyatakan anti terhadap *full day school*.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan; *Full Day School*

Abstract: *The effectiveness of a policy can be determined after an evaluation of the policies conducted. Policy of Full day school endorsed by the Education Minister under the law on Permendikbud number 23 Year 2017 is considered still not been adopted universally in Indonesia, because there are still many things that need to be re-examined on the implementation, where there are still many weaknesses in the educational system full day school. For that Permendikbud is canceled by the issuance of Presidential Decree number 87 Year 2017 on Article 9, where the education system only full day school is optional, and not required to be applied in all schools Indonesian. Referring to the developed countries such as the US, Japan and Finland in the implementation of full day school is also not requiring all schools to implement these systems. In fact, Finland as the country ranks first in the world in the field of education version of MED NF, 2017, declared anti to full day school.*

Keywords: *Evaluation; Policy; Full Day School*

PENDAHULUAN

Dampak negatif globalisasi bagi pendidikan mampu mengikis karakter peserta didik. Untuk itu, pemerintah dengan berbagai upaya melalui kebijakan yang dibuatnya berusaha semaksimal mungkin agar penguatan karakter peserta didik dapat ditingkatkan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah mencanangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sekolah dianggap lebih efektif untuk

melakukan restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hari sekolah dilaksanakan selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu dengan penambahan jam pelajaran 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Kebijakan lima (5) hari sekolah yang kemudian lebih populer dengan sebutan *full day school* yang disingkat FDS ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun lamanya terhitung dari tanggal dicanangkannya.

Sistem FDS merupakan isu kekinian yang lahir mewarnai dunia pendidikan saat ini. Meskipun sistem pembelajaran ini sudah sangat lama dipakai di pesantren, namun sistem ini baru akan diperkenalkan di sekolah umum. Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia, dimana menerapkan sistem *Full 24 Hour School*, sistem pendidikan 24 jam. Pendidikan pesantren juga memperkenalkan kepada santrinya doktrin "*Long Life Education*", pendidikan seumur hidup. Doktrin tersebut sesuai dengan kata-kata hikmah, "tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat".

Berbeda dengan penerapan FDS di pesantren, FDS di sekolah umum ini merupakan FDS yang diadopsi dari Negara Amerika. FDS merupakan program yang lahir di negara Amerika pada tahun 1980-an yang dimulai dari jenjang sekolah taman kanak-kanak kemudian naik pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi hingga sampai pada sekolah menengah atas. Latar belakang munculnya sendiri program ini adalah karena semakin banyaknya ibu-ibu yang memiliki anak berusia di bawah enam (6) tahun dan juga kebanyakan dari ibu-ibu pada saat itu memiliki profesi di luar rumah sehingga peningkatan aspek kehidupan yang membuat munculnya program pendidikan ini. Oleh karena itu, banyak ibu-ibu kemudian yang menginginkan anak-anak mereka memiliki nilai akademik yang baik agar dapat melanjutkan pada jenjang berikutnya serta dapat pula mengatasi masalah-masalah kemajuan zaman. Harapan yang kemudian lahir dari program ini pada dasarnya adalah dengan memasukkan anak-anak mereka pada sekolah yang memiliki program FDS, orang tua tidak perlu khawatir anak-anak mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat ketika berada di luar sekolah dan tidak berada juga di rumah sehingga ketika mereka berada di sekolah hingga sore membuat anak-anak hanya menghabiskan waktunya untuk belajar

dan sorenya bisa kembali berkumpul bersama keluarga (<http://pendapatpakar.com>).

Setiap kebijakan yang telah dicanangkan haruslah dilakukan evaluasi agar dapat dinilai kebijakan tersebut efektif, efisien dan layak untuk dilanjutkan. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan produk (*output*) berupa penilaian terhadap sebagian atau seluruh elemen dari proses kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan dilaksanakan setelah kebijakan diimplementasikan (Nugroho, 2009). Dengan demikian, evaluasi kebijakan baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan itu sudah diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu.

Studi ini sangat penting dihadirkan mengingat kebijakan FDS sangat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan FDS. Penelitian pertama dilakukan oleh Apriyani, dkk (2018) di Semarang, penelitian ini mengungkap bahwa (1) alasan SMA Negeri 1 Kedungreja kembali pada kebijakan enam hari sekolah pasca FDS karena dalam pelaksanaan FDS sekolah mengalami kendala yang berdampak pada kualitas pembelajaran, baik pada aspek proses maupun hasil; (2) proses pelaksanaan pembelajaran dalam sekolah enam hari pasca FDS di SMA Negeri 1 Kedungreja tidak jauh berbeda dengan pembelajaran ketika FDS baik dilihat dari model dan metode yang digunakan; (3) guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik memberikan tanggapan yang beragam terkait pelaksanaan sekolah enam hari pasca FDS, baik pro dan kontra sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Penelitian kedua oleh Rahayu, dkk (2018) di Malang, dimana penelitiannya mengungkapkan bahwa "sekolah tersebut dapat melanjutkan program pembelajaran FDS, karena mampu memberikan manfaat dan memfasilitasi bakat dan minat siswa serta mampu memenuhi kebutuhan orang tua siswa

yang mayoritas adalah pekerja”. Namun, terdapat beberapa rekomendasi pada penelitian ini agar program pembelajaran FDS di SDN Bunulrejo 2 Malang dapat mencapai tujuan yaitu: (1) perlu adanya penambahan ruangan yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler guna menunjang ketercapaian program; (2) perlunya motivasi yang diberikan guru kepada siswa agar memiliki kesadaran tinggi dalam memacu prestasi akademiknya; (3) orang tua siswa perlu adanya kerjasama, dukungan, serta dukungan moril untuk menjadikan pribadi siswa menjadi lebih baik.

Ketiga, studi ini didukung oleh penelitian Kristiawan dan Tobari (2017) yang menyimpulkan bahwa “pelaksanaan *full day school* mampu menjadi alternatif untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan, baik prestasi maupun moral”. Keempat, penelitian oleh Benawa, dkk (2018) di Bogor mengungkapkan bahwa “FDS sangat efektif dalam sistem pendidikan untuk membangun karakter siswa Sekolah Dasar”. Kelima, studi ini didukung oleh penelitian Berthelon, dkk (2016) di Chile, yang mengungkapkan bahwa “keluarga yang berpenghasilan rendah lebih cenderung memilih FDS dan program FDS mampu meningkatkan pemahaman membaca anak kelas dua (2) SD”.

Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi dalam analisis kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Enadarlita dan Asvio, 2019). Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 2008) (Kristiawan dkk, 2016) (Kristiawan dan Elnanda, 2017). Sementara itu, menurut Anderson (1984) kebijakan dikembangkan

oleh instansi pemerintah dan pejabat. Berdasarkan pendapat Anderson tersebut, Wandasari, dkk (2019) mengungkapkan bahwa (1) kebijakan selalu memiliki tujuan tertentu; (2) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah; (3) kebijakan berisi tindakan; (4) kebijakan dapat menjadi positif dalam arti tindakan pemerintah pada masalah tertentu; dan (5) kebijakan dalam arti positif didasarkan pada undang-undang dan mengikat. Pada intinya sebuah kebijakan dibuat harus dapat diimplementasikan.

Setelah diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu, kebijakan haruslah melewati proses evaluasi agar kebijakan dapat dinilai efektivitas, efisiensi dan kelayakannya untuk dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1984).

Sifat dari evaluasi yaitu: (1) fokus akan nilai; (2) interdependensi fakta-nilai; (3) orientasi masa kini dan masa lampau; (4) dualitas nilai. Fungsi evaluasi memainkan fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2008). Kriteria evaluasi, pendekatan dan teknik evaluasi berdasarkan pendekatan menurut Dunn (2008), dapat dipahami dari tabel-tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Biaya Manfaat Bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Tabel 2. Tiga Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimental sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi	Menggunakan	Tujuan dan	Penilaian

Keputusan Teoritis	metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut
--------------------	---	---	--

Tabel 3. Teknik Evaluasi Berdasarkan Tiga Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Teknik
Evaluasi Semu	Sajian Grafik Tampilan tabel Angka Indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu-regresi
Evaluasi Formal	Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak-silang Diskonting
Evaluasi Keputusan Teoritis	<i>Brainstorming</i> Analisis argumentasi Delphi kebijakan Analisis survei-pemakai

Full Day School (FDS)

FDS dapat diartikan dengan sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45-15.00 dengan waktu istirahat setiap dua jam sekali. Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi. Pengaturan jadwal mata pelajaran dan pendalaman merupakan hal yang diutamakan dalam FDS (Baharudin, 2010).

Sismanto dalam artikel “Menakar Kapitalisasi *Full Day School*” juga mengungkapkan bahwa FDS merupakan sekolah sepanjang hari dengan proses pembelajaran yang dimulai dari pukul 06.45-15.00 WIB dengan durasi istirahat setiap 2 jam mata pelajaran. Basuki (Baharudin, 2010)

menyatakan bahwa dalam FDS, sebagian waktunya digunakan untuk program pelajaran yang suasanaanya informal, menyenangkan bagi siswa, dan membutuhkan kreativitas serta inovasi dari pendidik (Lian, dkk 2018). Sulistyaningsih (2008) menyatakan bahwa sekolah bertipe *full day* ini berlangsung hampir sehari penuh lamanya, yakni dari pukul 08.00 pagi hingga 15.00 sore.

Berdasarkan paparan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa FDS adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore dengan sebagian waktunya digunakan untuk program pembelajaran yang suasanaanya informal serta menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan bebas sesuai dengan bobot mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik.

Loukeris et.al (2009) menyatakan bahwa *holoimero school* atau *all day school* juga dapat dikatakan sebagai *full day school* memiliki tujuan pelaksanaan pendidikan. Loukeris et.al (2009) mengungkapkan bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan *holoimero school* adalah untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan siswa (belajar, intervensi mengajar tambahan bahasa dan matematika, mengajar konsolidasi, program individual oleh guru sekolah dari kelas sore). Selanjutnya, adanya pengayaan materi pokok dengan mata pelajaran yang dikhususkan pada budaya dan sosial (bahasa Inggris, olahraga, musik, tari, studi teater, seni, teknologi baru dalam pendidikan), sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa serta diajarkan oleh guru khusus.

Mufidati (2013) menyatakan bahwa sistem pembelajaran dalam *full day school* menerapkan konsep dasar *Integrated-Activity* dan *Integrated-Curriculum*. Hal inilah yang membedakan dengan sekolah pada umumnya. Dalam *full day school* semua program dan kegiatan siswa di sekolah, baik belajar, bermain, beribadah dikemas dalam sebuah sistem pendidikan. Hal yang ditekankan adalah siswa selalu berprestasi dengan

pembelajaran yang berkualitas dan diharapkan akan terjadi perubahan positif dari setiap siswa.

Baharudin (2010) menyatakan bahwa sekolah yang bersistem *full day school* tidak hanya berbasis sekolah formal, namun juga informal. Sistem pengajaran yang diterapkan sangat menyenangkan (tidak kaku dan monoton). Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif sedangkan siswa diberi keleluasaan untuk memilih tempat belajar. *Full day school* identik dengan permainan, tujuannya agar proses belajar mengajar penuh dengan suasana kegembiraan. Sekolah yang menerapkan *full day school* dapat menciptakan situasi yang sangat menyenangkan serta mewujudkan keakraban antar siswa dan guru yang nantinya melahirkan generasi cerdas intelektual serta emosional. Sulistyaningsih (2008) menyatakan bahwa sekolah bertipe *full day school* dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang luas kepada anak, misalnya pergi berdarmawisata, ke taman, ke kebun binatang, daerah pertanian, dan sebagainya.

Teori karakteristik *full day school* ini juga didukung oleh kajian penelitian Kristiawan & Tobari (2017) di Padang Panjang yang mengungkapkan bahwa "*the basic concept of the full-day school in Padang Panjang Superior Integrated Islamic Primary School (MIUT) Thawalib, West Sumatra is "Integrated-Curriculum"*". Berikutnya, penelitian Piliang, et.al (2017) di Medan juga mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan penelitian Kristiawan & Tobari di Padang Panjang. Dimana penelitiannya mengungkapkan bahwa "*this relatively long time allows the school to teach all the materials contained in the curriculum, including the material in the local curriculum as learning Arabic, Alquran (tahfiz, tahsin), prayer together, Kultum, and others that related to the religious curriculum*".

Berdasarkan paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik *full day*

school lebih mengedepankan akhlak dan prestasi akademik, tenaga pengajar terdiri dari guru-guru bidang studi yang profesional, menggunakan kurikulum terpadu. *Full day school* juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler, sistem pengajarannya sangat menyenangkan, serta memberikan pengalaman belajar yang luas pada anak.

Full day school mengimplementasikan konsep dasar yaitu “*integrated activity*” dan “*integrated-curriculum*”. Inilah perbedaan *full day school* dengan sekolah pada umumnya. Pada *full day school*, semua program dan kegiatan peserta didik di sekolah seperti; belajar, bermain, beribadah termasuk dalam sistem pendidikannya. Hal yang ditekankan pada *full day school* adalah peserta didik selalu mampu meningkatkan prestasi pada kualitas proses belajar, seperti perubahan kepribadian yang positif sebagai hasil dari proses belajar (Syah, 2004). Muhaimin (Baharudin, 2010) menjelaskan ada berbagai alasan orang tua memilih *full day school* sebagai pendidikan anaknya, antara lain:

- a. Banyaknya orangtua tunggal dan padatnya aktivitas orangtua yang kurang memberikan perhatian pada anaknya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas anak setelah pulang dari sekolah;
- b. Perubahan sosial-budaya yang terjadi di masyarakat (dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri) yang mempengaruhi pola pikir dan cara pandangnya;
- c. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga jika tidak dicermati, maka dapat menjadi korban teknologi komunikasi.

Full day school memiliki keunggulan dan beberapa nilai plus diantaranya Baharudin (2010):

- a. Anak memperoleh pendidikan umum antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan;
- b. Anak mendapatkan pendidikan kepribadian yang bersifat antisipatif

terhadap perkembangan sosial budaya yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan globalisasi;

- c. Potensi anak tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah;
- d. Perkembangan bakat, minat, dan kecerdasan terantisipasi sejak dini melalui pantauan program bimbingan dan konseling.

Berdasarkan paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keunggulan *full day school* yakni anak memperoleh pendidikan umum antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, anak mendapatkan “*integrated education*” meliputi tiga bidang yakni kognitif, afektif, psikomotorik, anak mendapat pelajaran dan bimbingan ibadah praktis (doa makan, doa-doa harian, dan lain-lain). Keunggulan *full day school* lainnya adalah anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya dengan perpustakaan yang *representative*, serta potensi anak tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah.

Hilalah (2012) menyatakan bahwa faktor penunjang pelaksanaan *full day school* yakni:

- a. Lingkungan sekolah yang kondusif
Lingkungan sekolah yang kondusif dapat terwujud apabila kepala sekolah memiliki kecerdasan emosi tinggi dan gaya kepemimpinan yang tepat.
- b. Kompetensi manajerial kepala sekolah
Kompetensi manajerial kepala sekolah meliputi kemampuan manajemen dan kepemimpinan, yang dilengkapi keterampilan konseptual, insani, dan teknis.
- c. Profesionalisme guru
Adanya guru profesional diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan proses belajar mengajar serta mampu memaksimalkan perkembangan anak didik dengan sebaik-baiknya.
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana tersebut berupa buku bacaan, ruang belajar, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Semua itu sangat berguna sebagai pendukung pelaksanaan *full day school* bahkan menjadi faktor yang sangat penting dalam kelancaran proses belajar-mengajar.

e. Partisipasi orang tua

Hubungan baik antara sekolah dengan orangtua/wali siswa akan mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. Mereka saling memberikan informasi tentang perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di keluarga sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang pelaksanaan *full day school* meliputi kurikulum, manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, sarana prasarana yang lengkap, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Lingkungan sekolah yang kondusif, kompetensi manajerial kepala sekolah, adanya partisipasi orang tua juga mendukung dalam pelaksanaan *full day school*.

Baharudin (2010) menyatakan bahwa sistem pembelajaran *full day school* memiliki faktor penghambat yaitu aspek sarana dan prasarana serta aspek guru. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dapat menghambat kemajuan sekolah, karena hakikatnya sarana dan prasarana merupakan bagian vital yang menunjang keberhasilan pendidikan (Fitria dkk, 2017) (Fitria, 2018). Guru mendampingi siswa selama sehari di sekolah dalam sistem pembelajaran *full day school*. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami perbedaan kemampuan dan karakter siswa. Guru juga dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, disiplin, upaya pribadi dan kerukunan kerja serta profesionalitas. Jika guru tidak memiliki hal tersebut, maka akan menghambat pengembangan sekolah.

Sementara itu, faktor penghambat jalannya implementasi FDS menurut Astuti (2013) yaitu (1) wali murid, kurang percaya orang tua pada sekolah untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi anak; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar; (3) anak didik, perbedaan pola pendidikan anak yang dibawa dari lingkungan sehingga membedakan tingkat kematangan anak didik (Nopilda dan Kristiawan, 2013).

Berdasarkan paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat *full day school* yakni keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru dan partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan pendidikan bersifat *input oriented* dan pengelolaannya yang banyak diatur oleh pusat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *full day school*.

Sistem Pendidikan di Negara-negara Maju

1. Amerika Serikat

Sekolah wajib bagi anak-anak di Amerika. Pada umumnya, anak memulai pendidikan dasar pada usia 5 atau 6 tahun untuk pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Pendidikan menengah berakhir pada usia 18 tahun atau lebih. Beberapa sekolah pada daerah tertentu mengizinkan siswa untuk menyelesaikan sekolah pada usia 16 tahun. Sekitar 85% siswa di Amerika bersekolah di sekolah umum. Sekitar 10.4% siswa mengikuti sekolah wajib mereka secara *private*. Kebanyakan siswa mengikuti sekolah 8 jam/hari, biasanya 175 hingga 185 jam/tahun. Pada umumnya, sekolah memiliki liburan musim panas atau "*a summer break*" selama kurang lebih 2.5 bulan dari bulan Juni hingga Agustus (Wieczorek, 2008).

Dari hasil penelitian Wieczorek tersebut, pemakalah menyimpulkan bahwa Amerika menerapkan *full day school* dalam pendidikannya. Hal ini disebabkan oleh jam

belajar siswa hingga 8 jam/hari, biasanya 175 hingga 185 jam/ tahun.

2. Jepang

Pendidikan wajib dan gratis bagi semua anak-anak yang bersekolah dari kelas I hingga kelas IX. Berdasarkan data dari pemerintah, lebih dari 90% siswa mengikuti sekolah umum dari TK hingga kelas IX. Diantara 75% hingga 80% siswa Jepang mengikuti persiapan untuk pendaftaran ke perguruan tinggi (Wieczorek, 2008:101). Sejak 2001, siswa hanya bersekolah selama lima hari, dan hari Sabtu merupakan "*free days*" atau di Jepang dikenal dengan *Yutori Kyoiku* (*unhurried education*), sebagai opsional pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler (Wieczorek, 2008).

3. Persamaan Pendidikan di Amerika Serikat dan Jepang Berdasarkan Hasil Penelitian Wieczorek pada Tahun 2008

Fokus Pendidikan, Amerika Serikat dan Jepang tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap kegiatan pendidikan. Korelasi antara pendidikan, sosial ekonomi dan kemampuan berpolitik, kedua negara mendanai prestasi akademik secara bebas dan menyediakan sumber daya tambahan. Dengan demikian, kesuksesan nasional dikaitkan dengan keberhasilan individu.

Struktur pendidikan, secara organisasi, baik AS maupun Jepang membahas pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Kedua negara memiliki badan federal untuk pengawasan, yaitu Departemen Pendidikan A.S. dan MEXT (kementerian pendidikan Jepang). Kedua negara mempertahankan tanggung jawab negara dan daerah di Departemen pendidikan dan Dewan Pendidikan Daerah, yang memberikan panduan kepada masing-masing distrik sekolah (AS) dan dewan pendidikan kota Jepang.

Pendidikan Wajib, baik sistem Jepang maupun Amerika, sekolah baik publik

maupun swasta, adalah wajib, dan bervariasi di kedua negara. Di AS, kebanyakan anak memulai pendidikan dasar dengan taman kanak-kanak (usia lima atau enam) dan, tergantung pada persyaratan kabupaten, menyelesaikan pendidikan mereka di tahun sekolah menengah (usia delapan belas). Beberapa negara bagian mengizinkan siswa untuk meninggalkan sekolah pada usia enam belas tahun, sebelum menyelesaikan sekolah menengah atas. Di Jepang, kebanyakan pendidikan dasar pada anak dimulai dikelas satu, walaupun orang tua biasanya mengirim anak-anaknya ke TK sebelumnya. Siswa diminta untuk mengikuti sekolah sampai kelas sembilan di sekolah menengah pertama (usia lima belas).

Kehadiran Siswa, Sejak 2002, mahasiswa di Jepang telah menghadiri sekolah lima hari kerja penuh seperti rekan-rekan mereka di Amerika Serikat; mereka memiliki akhir pekan untuk kegiatan pribadi. Kedua negara memberikan liburan musim panas dan istirahat dari kegiatan akademis. Kalender bervariasi tergantung pada dewan sekolah setempat.

Persyaratan Kurikuler, kedua negara memberi siswa rencana studi yang spesifik, dan siswa diminta untuk melengkapi inti mata pelajaran. Melek huruf diukur dalam membaca, matematika, dan isi sains. Sejak tahun 1995, kedua negara telah mengikuti studi Tren dalam Studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Internasional (TIMMS) untuk mengukur prestasi siswa dalam Matematika dan sains. Penilaian internasional ini telah menghasilkan sebuah kendaraan yang mengukur pertunjukan kelas empat dan delapan di 37 negara maju pada tahun 1995, 1998, dan 2003. Dua Puluh Tiga hasilnya menunjukkan tren dimana negara dapat menyesuaikan fokus pendidikan mereka.

Kegiatan ekstrakurikuler, siswa di Jepang dan Amerika Serikat berpartisipasi dalam kegiatan di luar tanggung jawab akademis. Siswa menikmati olah raga, band, klub, kelompok akademis, dan budaya pop seperti

video game, telepon seluler, dan komunikasi internet.

Persyaratan guru, baik sekolah Jepang maupun Amerika berkomitmen untuk mempekerjakan staf profesional berkualifikasi tinggi. Guru di kedua negara diminta untuk lulus ujian tingkat distrik atau bagian untuk mendapatkan lisensi oleh dewan pendidikan daerah atau sekolah umum. Guru di kedua negara diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional.

Students Attitudes, terdapat kesamaan yang penting antara sikap siswa di Jepang dan Amerika Serikat. Meski kebanyakan siswa yang terdaftar dalam pendidikan secara aktif terlibat dalam pendidikan mereka, ada banyak bukti, seperti di banyak negara, yang semakin peduli dengan disiplin. Beberapa orang siswa dari negara anggota OECD yang disurvei menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak mereka inginkan. Masih ada hubungan yang kuat antara sikap dan hasil siswa. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah menunjukkan bahwa sementara siswa Jepang sangat termotivasi, ada banyak masalah: kehilangan minat di sekolah, sindrom penolakan sekolah, dan kekerasan di sekolah.

4. Perbedaan Pendidikan di Amerika Serikat dan Jepang Berdasarkan Hasil Penelitian Wieczorek pada Tahun 2008

Persyaratan pendidikan, meskipun Jepang dan Amerika Serikat mewajibkan wajib belajar, sistem ujian masuk Jepang memberi pengaruh kuat ke seluruh sistem. Siswa diminta untuk lulus ujian masuk yang ketat untuk masuk sekolah menengah atas (kelas X sampai XII) dimana hampir 94% dari mereka yang menyelesaikan sekolah menengah pertama. Lulusan sekolah menengah atas harus lulus ujian masuk yang lain, yang lebih sulit dilakukan, yang mana 33% mendaftar ke universitas empat tahun, diploma atau institusi pascasarjana lainnya.

Persyaratan kurikuler, meskipun Jepang dan AS mengikuti persyaratan kurikuler, kurikulum nasional Jepang menghadapkan siswa pada “pendidikan dasar dan seimbang” yang dikenal dengan perlakuan yang sama terhadap siswa. AS tidak memiliki kurikulum nasional; sebagai gantinya, dewan pendidikan negara bagian masing-masing mengatur kurikulum di seluruh negara bagian. Beberapa sekolah mendorong siswa untuk mengambil pilihan di bidang minat karir. Umumnya, siswa SMA di AS mengambil berbagai kelas tanpa penekanan khusus. Kurikulum bervariasi dalam kualitas. Beberapa negara bagian menganggap 70 (pada skala 100 poin), sementara di tempat lain nilai kelulusan bisa serendah 60 atau setinggi 75.

Isu yang sedang berlangsung adalah kreativitas siswa, fleksibilitas, atau ekspresi individu. Pemikiran kritis bukanlah konsep yang sangat dihargai di Jepang. Siswa di Jepang diregulasi dan diarahkan untuk ketekunan dan disiplin diri. Siswa di Amerika Serikat menghabiskan sekitar delapan jam per hari untuk kegiatan akademik rata-rata 180 hari per tahun; siswa Jepang menghabiskan rata-rata empat sampai enam jam lebih banyak per hari dalam 210 hari setiap tahun, meskipun mereka diberi pekerjaan rumah lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka di AS.

Administrasi pendidikan, ada perbedaan penting antara guru dan staf di Amerika dan Jepang. Staf di Jepang menggunakan sistem instruksi dan pembelajaran “berkualitas tinggi” yang lebih kolaboratif. Siswa diminta mengenakan seragam sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Siswa Jepang tidak pernah dilaporkan kepada kepala sekolah untuk perilaku buruknya; sebaliknya, guru berkomunikasi dengan orang tua. Sekolah-sekolah di Jepang mempekerjakan satu kepala sekolah dan satu asisten kepala sekolah atau guru yang menjabat sebagai kepala sekolah, yang juga aktif di kelas.

Keduanya ditunjuk oleh dewan pendidikan daerah.

Sekolah di Jepang mempekerjakan staf yang sangat sedikit dan tidak menyediakan transportasi umum bagi siswa. Siswa sering berjalan atau naik sepeda berangkat sekolah maupun pulang atau kegiatan lainnya. Sekolah lebih memilih menggunakan dapur untuk konsumsi siswa dibanding membuka kafe yang konsumtif. Siswa bergiliran memilih makanan yang disiapkan untuk hari itu dan melayani sesama siswa di kelas mereka. Mereka memakai masker pelindung lengan untuk mencegah masuknya kuman atau bakteri, lalu kembalikan mangkuk bekas dan sisa makan ke dapur. Setiap sekolah mempertahankan program daur ulang yang kuat: semua daur ulang dipisahkan sebelum dikembalikan ke dapur. (siswa ditempatkan di kelas yang sama sepanjang tahun akademik, sebuah praktik yang mendorong kerja tim dan kebanggaan di sekolah mereka. Sekolah mempekerjakan satu orang perawat dan satu petugas kebersihan. Siswa bertanggung jawab atas kebersihan sekolah dan lapangan sekolah setelah kelas selesai. Dengan cara seperti itu, sekolah-sekolah di Jepang menumbuhkan pendidikan moral dan pengembangan karakter yang kuat.

Rata-rata ukuran kelas di Jepang berkisar antara tiga puluh lima dan empat puluh lima siswa. Sedangkan rata-rata ukuran kelas Amerika adalah dua puluh lima sampai tiga puluh. Sebagian besar ruang kelas di Jepang kekurangan komputer dan proyektor overhead, walaupun beberapa memiliki televisi dengan peralatan video yang terpasang. Guru memang memiliki akses ke internet, namun tidak digunakan untuk pengajaran siswa.

Guru wali kelas diharuskan mengunjungi rumah-rumah setelah sekolah untuk bertemu dengan orang tua, membangun hubungan baik, dan mengkomunikasikan siswa 'kekuatan dan kelemahan siswa ke pada orang tua'. Keterlibatan orang tua sangat terkait dengan

keberhasilan siswa. Dengan demikian, pengajaran menyeluruh dan pendekatan yang komprehensif tampaknya memainkan peranan besar dalam kesuksesan akademis siswa Jepang. Sebaliknya, sekolah Amerika sangat terfragmentasi dalam pendekatan mereka terhadap kesuksesan siswa. Struktur otoriter dengan staf spesialis yang besar mendorong isolasi siswa dan iklim negatif melalui pengujian standar. Sekolah Amerika kurang memiliki pendekatan pendidikan dan pendidikan yang komprehensif; sebagai gantinya, staf sekolah di Amerika fokus pada inisiatif pendukung yang mengakomodasi ketidakmampuan belajar dan kebutuhan khusus bagi siswa.

Sikap siswa, ada perbedaan penting antara sikap siswa Jepang dan Amerika. Siswa Jepang sangat termotivasi; mereka terus berusaha mencapai puncak dalam aktivitas akademis apapun yang mereka pilih, olah raga ataupun band. Seringkali perbedaannya ada pada guru. Di Jepang, pengajaran tetap merupakan profesi yang terhormat, dan status sosial guru tinggi berdasar dari budaya Jepang dan pengakuan publik terhadap tanggung jawab sosial mereka yang penting. Instruksi moral kelas formal, instruksi informal, dan bahkan kelas akademis semuanya dipandang sebagai tempat yang sah untuk pengajaran semacam ini.

Instruksi kelas utuh nampaknya menawarkan dukungan motivasi yang lebih besar daripada pemantauan. Siswa bekerja sama dalam materi yang sama dengan kecepatan yang sama; tidak ada yang tertinggal. Guru menekankan usaha atas kemampuan (ketekunan); melibatkan siswa (memikirkan banyak cara untuk memecahkan masalah yang mungkin); membangun hubungan yang kuat (interaksi sosial yang benar); dan menyatukan kelas (tujuan kelas). Guru berkomitmen pada keberhasilan siswa untuk mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan budaya belajar. Didokumentasikan dengan baik bahwa guru

Jepang berpendidikan lebih baik dan siap untuk mengajar matematika daripada rekan-rekan mereka di AS. Rencana pembelajaran guru matematika Jepang lebih kompleks dan melibatkan siswa dalam mengembangkan struktur kognitif dalam matematika.

5. Sistem Pendidikan di Finlandia Berdasarkan Hasil Penelitian Michael Francis Moore

“Rahasia Pendidikan di Finlandia satu diantaranya justru *anti-full day school*”. Michael yang lahir 23 April 1954 ini adalah seorang penulis buku dan sutradara film AS. Kali ini Michael membuat sebuah film yang menjawab kenapa pendidikan di Finlandia lebih baik dari Amerika bahkan melesat menjadi ranking 1 dunia. Michael menemui pejabat pengambil kebijakan pendidikan di Finlandia, kumpulan pada guru serta mewawancarai para murid. Ternyata di luar bayangan. Fakta-fakta mengejutkan terungkap pada video pendek tersebut berdasarkan wawancara Michael Moore dengan berbagai pihak. Finlandia tidak menjadikan para murid sebagai orang yang tiap saat berkulat dengan soal-soal mata pelajaran. Justru sebaliknya, para guru menekankan pada siswa untuk lebih banyak memiliki waktu luang untuk bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya, membaca buku serta menekuni semua minat serta bakatnya (Asmadi, 2017).

Anak usia dini misalnya setiap minggu hanya mendapatkan jatah belajar di sekolah selama 20 jam. Para siswa banyak bermain di halaman, memanjat pohon kemudian saat menemukan serangga, pengalaman tersebut jadi topik pembahasan dan diskusi dengan menyenangkan. Sementara para guru juga tak banyak memberikan pekerjaan rumah (PR) para murid menengah atas misalnya hanya mengerjakan PR di rumah antara 10 sampai 20 menit saja. Sisanya, mereka bermain, berkumpul dengan teman dan beraktivitas menyenangkan lainnya. Seorang guru matematika saat ditanya

oleh Michael bahkan mengatakan kalau para siswa harus bahagia, tujuannya agar para siswa dengan mudah menerima pelajaran (Asmadi, 2017).

Guru lainnya mengungkapkan para siswa diminta untuk melakukan aktivitas yang disukai, menyanyi, olah raga, seni agar otak berkembang dengan baik. Soal-soal ujian bahkan tak ada pilihan ganda dan semua siswa sebagian besar begitu mudah mengerjakan soal-soal yang diberikan. Di Finlandia tidak ada ujian nasional dan tak ada sekolah favorit. Semua sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada sekolah swasta di sana, semua sekolah dikelola oleh pemerintah. Saat pindah rumah tak ada yang bertanya mana sekolah unggulan atau favorit, sekolah di dekat rumah itulah sekolah unggulan (Asmadi, 2017).

Di sekolah, para siswa bahkan lebih banyak waktu untuk melakukan hal yang disukai, ada menjahit, bengkel karya seperti membuat gitar listrik, membuat robot, serta berbagai hal lainnya. Pendidikan di Finlandia menerapkan sedikit waktu untuk pertemuan di dalam kelas yang berkulat dengan soal-soal atau materi yang memusingkan. Mereka menerapkan jumlah jam pelajaran yang sedikit serta aktivitas yang menyenangkan agar murid bahagia dan dengan mudah menyerap pelajaran (Asmadi, 2017).

Berdasarkan data penelitian dari beberapa negara maju seperti AS, Jepang dan Finlandia, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan mereka bervariasi. Jepang dan AS menggunakan sistem pendidikan *full day school*, sementara Finlandia sebagai negara ranking I dunia di bidang pendidikan tidak menerapkan *full day school* untuk mendongkrak prestasi mereka dalam bidang ini. Dalam hal ini, pemakalah melihat bahwa *full day school* memang sebaiknya bersifat opsional yang disesuaikan dengan segala bentuk kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang terdapat pada sekolah masing-masing. Sehingga nantinya, *full day school*

dapat berjalan seefektif mungkin di sekolah-sekolah yang menerapkan sistem ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). George (2008) mengungkapkan *library research* “*is not a mystery or a lucky dodge, but an investigation you control from start to finish, even though you cannot usually tell what sources you will discover. On the other side, library research is a form of structured inquiry with specific tools, rules, and techniques*”.

Penelitian pustaka memanfaatkan sumber rujukan atau teori untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian ke lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *full day school* merupakan tujuan yang baik bagi pemerintah, walaupun sifatnya opsional boleh diterapkan atau tidak. Namun sayangnya, pemerintah terlalu optimis dan tidak melihat realitas yang ada bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia ini masih kekurangan fasilitas yang memadai dan kualitas serta kuantitas guru yang kurang, menyadari tantangan dan persoalan tersebut kita harus tetap optimis bahwa pendidikan kita tetap akan maju dengan cara kita mau diajak berubah satu sama lain. Selama ini yang terjadi sekolah unggulan dimonopoli oleh pemegang otoritas pendidikan seperti Kemendiknas. Sekolah unggulan diterapkan sekedar menciptakan prestasi anak didik, kurikulum dirancang sarat muatan, diajar guru berkualitas, dengan sarana-prasarana yang bagus, tapi biayanya sangat mahal. Padahal Sekolah unggulan kemungkinan dapat dicapai bila seluruh sumber daya Sekolah dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari tenaga administrasi, pengembang kurikulum, tenaga pendidik, termasuk masyarakat harus

dilibatkan secara berdaya guna. Karena semua sumber daya itu akan dapat menciptakan iklim dan kultur yang mampu membentuk keunggulan Sekolah (Hasan, 2015).

H.A.R Tilaar sendiri memberikan makna yang sedikit berbeda tentang “kebijakan pendidikan”, menurutnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal (Solichin, 2015). Kebijakan yang tidak mampu direalisasikan dengan baik hanya akan menjadi impian semata.

Permendikbud yang dikeluarkan dinilai terlalu melanggar prinsip kebebasan dari HAM. Kebebasan HAM adalah seseorang yang memiliki kebebasan berarti ia memiliki persamaan derajat (Awaludin, 2012). Artinya bahwa seseorang memiliki posisi yang sama dengan yang lain dan tidak boleh tunduk kepada sistem yang mengekang. Permendikbud ini dalam pasalnya mewajibkan anak untuk sekolah selama 5 hari selama 8 jam disini anak dikekang untuk menerima doktrin-doktrin dari guru mereka bahwa sekolah itu identik dengan nilai, nilai, dan nilai. Sekolah unggul harus menghasilkan lulusan yang unggul, keunggulan lulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai yang tinggi, indikasi lulusan tinggi baru dikatakan berhasil apabila mereka berhasil di dunia kerja dan dalam bermasyarakat (Hasan, 2015). Padahal anak bebas untuk berkarya dan belajar hal baru diluar sekolah. Kemampuan lulusan yang dihasilkan merasa unggul apabila mereka mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional dan spiritualitasnya dimana mereka berada (Hasan, 2015). Untuk itu permendikbud tersebut dibatalkan karena menciderai HAM. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini ternyata juga mematikan Madrasah.

Banyak kalangan mengatakan bahwa peraturan tersebut semakin memisahkan Indonesia menuju Negara sekuler, Negara yang memisahkan nilai-nilai moral pada ranah pribadi. Kebijakan itu dinilai terlalu berbahaya karena dapat merusak nilai luhur bangsa Indonesia yang berfalsafah pada Pancasila. Anehnya peraturan menteri tersebut telah menganggap bahwa urusan agama adalah nanti saja, karena anak-anak untuk belajar agama di madrasah mustahil karena madrasah mulai melakukan aktivitasnya pada jam 4 sore sedangkan anak-anak pulang dari sekolah pada pukul 4 atau lebih. Menteri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang diberikan oleh presiden untuk mendelegasikannya, dalam hal ini adalah mewakili presiden. Kebijakan seperti ini akan mengganggu kredibilitas dan elektibilitas Presiden Jokowi, karena bukan salah masyarakat untuk tidak percaya kepada pemimpinnya tetapi salah pemimpinnya yang tidak mampu memuaskan masyarakat yaitu tentang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terus mengundang kontroversi karena tidak adanya alasan yang tepat serta keraguan dalam membuat kebijakan. Pemerintah dalam hal ini yaitu menteri pendidikan telah mengabaikan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang berlandaskan pada perundang-undangan dan keadilan serta kepatutan hukum di masyarakat. Untuk itu, maka pemerintah membatalkan permendikbud tersebut. Pembatalan tersebut berarti pemerintah telah melindungi HAM.

Solusi, Perpres merupakan solusi untuk melindungi HAM. Ditinjau dari karakter bangsa Indonesia kebijakan tersebut tidak sesuai karena kebijakan *full day school* yang dikeluarkan menteri lebih banyak ruginya/mudharatnya ketimbang untungnya. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politik etis semata yang

menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri (Solichin, 2015). Untuk itu, pemerintah dalam hal ini telah melakukan tindakan bijak dengan mencabut peraturan menteri nomor 23 tahun 2017 karena peraturan tersebut dinilai terlalu meresahkan terutama bagi kalangan pendidik dan orang tua. Didalam peraturan tersebut jelas-jelas adanya unsur pemaksaan anak dalam bersekolah dalam durasi waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden bersama kemendikbud telah mengeluarkan Perpres dalam pasal 9 nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter di mana aturannya kewajiban sekolah 6 hari penuh dengan durasi waktu 8 jam bersifat opsional. Aturan ini menggantikan peraturan Kemendikbud nomor 23 Tahun 2017, berdasarkan dalam perspektif hukum dan HAM, kebijakan pemerintah ini telah melindungi kebebasan tiap orang untuk mengembangkan minat dan potensi yang lain. Permendikbud tersebut terlalu memaksakan dikarenakan kualitas dan kuantitas pendidikan kita yang kurang memadai dan pendidikan bukan hanya formal seperti sekolah saja tetapi ada pendidikan non formal seperti madrasah.

Perpres dikeluarkannya untuk membatalkan permendikbud tentang kebijakan *full day school*. Karena di dalam perpres tersebut menjunjung tinggi *natural right*. *Natural right* adalah hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah, karena *natural right* merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya abadi dan universal. Untuk itu, kita harus melindungi hak-hak anak sesuai dengan pengesahan konvensi internasional tentang anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the right of the child* (Rahayu, 2015) yang berisi bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak untuk

berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita mau. Jangan sampai pemerintah terus-menerus melakukan *blunder* atas suatu kebijakan yang lainnya, karena apabila hal itu terus-menerus melakukan hal yang sama maka yang menjadi korbannya adalah rakyat karena rakyat menjadi korban dari tarik ulur kebijakan suatu pemerintahan. Jika presiden pada waktu itu tidak mengeluarkan perpres maka akan mencederai konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia adalah negara yang toleransinya sangat tinggi dalam hal keanekaragaman suku, agama dan budaya. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan tapi malah mendiskreditkan suku, agama dan budaya lain. Karena hal itu akan mencederai dari Pancasila itu sendiri. Padahal Pancasila itu dirumuskan dengan segala tumpah darah, dan semangat yang sama yaitu untuk membuat Indonesia lebih baik lagi, lebih aman lagi lebih bersatu lagi dan memandang dalam sebuah perbedaan adalah Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Memimpin Indonesia apabila tidak didasarkan amanah dan tidak berlandaskan kejujuran tentu akan membuat Indonesia semakin terpuruk.

Dunia internasional menganggap bahwa Indonesia seperti melihat negara yang terbentuk dari emas, artinya apa? Indonesia adalah Negara kaya apabila dikelola dengan baik dengan cara pemerintahnya mampu membuat kebijakan yang tepat. Mengkritik pemerintah bukan tujuannya untuk membenci tetapi untuk membangun. dalam demokrasi yang lebih modern yaitu *deliberative* yang diciptakan oleh Jurgen Habermas dari Jerman. Jurgen Habermas yang dikutip oleh Candraningrum (2012) dalam bukunya "Politik, Gender dan Ruang Publik, Narasi Kritik Habermas" yang menyebutkan "keruntuhan ruang publik biasanya dimanipulasi oleh dogma, teror, bias yang merekatkan negara dan manusia sipil secara semu karena adanya tumpang tindih".

Menjelaskan keputusan yang menyangkut tentang kebijakan publik haruslah diperdebatkan terlebih dahulu bersama semua unsur, bukan hanya dari pemerintahan saja seperti DPR, Menteri, maupun Presiden tetapi juga melibatkan unsur-unsur dan nilai-nilai dari masyarakat seperti: Pemuka Agama, Akademisi, rakyat dan lain-lain.

KESIMPULAN

Full day school yang dicanangkan oleh Mendikbud yang berpayung hukum pada Permendikbud nomor 23 Tahun 2017 dianggap belum mampu diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, dikarenakan masih banyak hal-hal yang perlu dikaji ulang tentang pelaksanaannya, dimana masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam sistem pendidikan *full day school*. Untuk itu Permendikbud ini dibatalkan dengan dikeluarkannya Perpres nomor 87 Tahun 2017 pada pasal 9, dimana sistem pendidikan *full day school* hanya bersifat opsional, dan tidak wajib diterapkan di seluruh sekolah Indonesia. Merujuk ke negara-negara maju seperti AS, Jepang dan Finlandia dalam penerapan *full day school* juga tidak mewajibkan seluruh sekolahnya untuk menerapkan sistem ini. Bahkan, Finlandia sebagai negara ranking I di dunia dalam bidang pendidikan versi NF MED 2017, menyatakan anti terhadap *full day school*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anonim. (2016). "Sejarah Sistem "*Full Day School*" dan Penerapannya". <http://pendapatpakar.com./2016/08/sejarah-sistem-full-day-school-dan-penerapannya.html>.
- Apriyani., dkk. (2018). "Dari *Full Day School* ke Kebijakan Enam Hari Sekolah: Rasionalisasi Praktik dan Evaluasi Pembelajaran Pasca *Full Day School*

- di SMA Negeri 1 Kedungreja Kabupaten Cilacap". *Jurnal Sosietas*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Asmadi. (2017). "Pendidikan di Finlandia Ranking 1 Dunia, Ternyata Rahasia Satu diantaranya Anti-Full Day School". <http://bangka.tribunnews.com/2017/06/15/pendidikan-finlandia-ranking-1-dunia-ternyata-rahasia-satu-diantaranya-anti-full-day-school?page=all>.
- Astuti, M. (2013). "Implementasi Program Fullday School sebagai Usaha Mendorong Perkembangan Sosial Peserta Didik TK Unggulan Al-Ya'lu Kota Malang". *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Juli 2013*;133-140. ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.
- Awaludin, H. (2012). "Ham:Politik, Hukum dan Kemunafikan. Jakarta: Kompas.
- Baharuddin. (2010). *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Benawa, A., et.al. (2018). "The Effectiveness of Full Day School System for Students' Character Building". IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 288 (2018) 012160, doi:10.1088/1757-899X/288/1/012160.
- Berthelon, M., et.al. (2016). "Longer School Schedules and Early Reading Skills: Effects from a Full-Day School Reform in Chile". *Discussion Paper Series, No. 10282, October 2016, the Institute for the Study of Labor (IZA), Germany*.
- Candraningrum, D. (2012). *Politik Gender dan Ruang Publik dalam Narasi Kritik Habermas*. Jakarta: Gadis Arivia.
- Dunn, W. N. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Enadarlita, E., & Asvio, N. (2019). Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi Di Provinsi Jambi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1).
- Fitria, H., Mukhtar, M., & Akbar, M. (2017). The Effect of Organizational Structure And Leadership Style on Teacher Performance In Private Secondary School. *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 1(02), 101-112.
- Fitria, H. (2018). The Influence of Organizational Culture and Trust Through the Teacher Performance in the Private Secondary School in Palembang. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
- George, M. W. *The Elements of Library Research. What Every Student Needs to Know*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Hasan, M. N. (2015). "Upaya Menjadikan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Unggul". *Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2015.
- Hilalah, N. (2012). *Faktor Pendukung dan Penghambat Full Day School*. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2246211-faktor-faktor-pendukung-dan-penghambat/>.
- Kristiawan, M., & Tobari. (2017). "The Characteristics of the Full Day School Based Elementary School". *Transylvanian Review: Vol. XXV, No. 14, 2017*.
- Kristiawan, M., & Elnanda, D. (2017). The Implementation of Authentic Assessment in Cultural History of Islamic Subject. *Al-Ta'lim Journal*, 24(3), 266-276.
- Kristiawan, M., Jumeldi, A., Ahmad, S., & Asvio, N. (2016). The Implementation of Affective Assessment For Islamic Education In High School 1

- Pariangan. *Research Journal of Social Sciences*, 9(4), 1-8.
- Lian, B., Kristiawan, M., & Fitriya, R. (2018). Giving Creativity Room To Students Through The Friendly School's Program. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
- Loukeris, D., et al. (2009). "Aspect of the Effectiveness of the Greek Holoimero ('All Day') Primary School". *Mediterranean Journal of Educational Studies*. Vol. 14 (2), pp. 161-174.
- Mufidati, K. (2013). *Full Day School dan Terpadu*. Surabaya: Program Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana STAIN Tulungagung.
- Nopilda, L., & Kristiawan, M. (2018). Gerakan Literasi Sekolah Berbasis Pembelajaran Multiliterasi Sebuah Paradigma Pendidikan Abad Ke-21. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2).
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Piliang, et.al. (2017). "An Analysis of Integrated Islamic School Al Ulum in Medan, Indonesia". *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 4, Ver. 6 (April 2017) PP 100-107*.
- Rahayu, A., dkk. (2018). "Evaluasi Program Pembelajaran *Full Day School* di SDN Bunulrejo 2 Malang". *Jurnal JINOTEP*, Vol. 4 No. 2 April 2018, ISSN 24058780.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Solichin, M. (2015). "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Demokrasi". *Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015*.
- Sulistyaningsih, W. (2008). *Full Day School dan Optimalisasi Perkembangan Anak*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Syah, M. (2004). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wandasari, Y., Kristiawan, M., & Arafat, Y. (2019). Policy Evaluation of School's Literacy Movement on Improving Discipline of State High School Students. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(4).
- Wieczorek, C. C. (2008). "Comparative Analysis of Educational System of American and Japanese Schools: Views and Visions". *Journal of Educational Horizons, Winter 2008*".